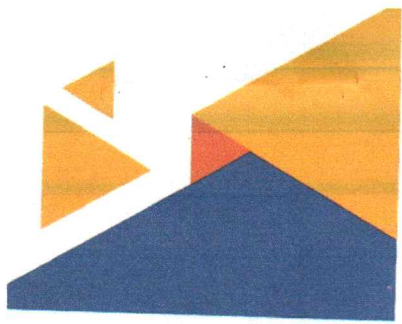




RENJA PERUBAHAN DP3AP2KB KOTA CIMAHI TAHUN 2024

**Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lt. III
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telepon/ Fax (022) 6632338
Cimahi 40513 Jawa Barat**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
BAB I_PENDAHULUAN.....	5
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI	4
1.3. LANDASAN HUKUM.....	4
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA	14
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD PADA SEMESTER 1 TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	14
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	26
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	27
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
BAB IV PENUTUP.....	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024 Kota Cimahi dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik sasaran maupun target capaian pada anggaran perubahan 2024 yang mengacu pada realisasi kinerja triwulan II tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) disusun sebagai penyesuaian dan penyempurnaan target maupun sasaran serta capaian yang tidak terpenuhi yang dianggarkan pada tahun anggaran murni dengan tujuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal diakhir tahun anggaran 2024 .

Kami berharap melalui Rencana Perubahan (RENJA PERUBAHAN) ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dapat mewujudkan Visi Kota yaitu Cimahi CERDAS.

Cimahi, Juli 2024

**dr. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
CIMAHI,**



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680101 199803 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu melakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan sebagai evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan Kegiatan dan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Cimahi.

Perubahan dalam rencana kerja tahun 2024 memuat dan menggambarkan perubahan pagu anggaran program dan kegiatan serta perubahan target dan sasaran kinerja program dan kegiatan, perubahan rencana Kerja didasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi merupakan organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja Perubahan DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun berjalan ditahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja OPD tahun 2024 yang mengacu pada realisasi semester I 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi (RPD) Tahun 2023 – 2026.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan melaksanakan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada semester sebelumnya dalam hal urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat .

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi mengampu satu misi Wali Kota Cimahi, yaitu Misi ke 1 dari 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekoomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan kedua misi yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi maka disusunlah Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggran DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AP2KB melaksanakan kewenangan meliputi 3 (tiga) Urusan Wajib Pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat, DP3AP2KB Kota Cimahi dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Eselon II b), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Ekonomi Masyarakat.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran.

Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan struktural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja DP3AP2KB Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Umum :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS
12. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2024 LD. Nomor 302 . TLD Nomor 61 Tanggal 29 Desember 2023;
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
17. Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 BD. 731, TBD Nomor 213 Tanggal 25 Desember 2023.

B. Landasan Hukum Material, terdiri dari :

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
17. Permen PP&PA No.11 Thn 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
18. Peraturan menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan PPPA;
19. Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. Undang Undang Nomor 52 tahun Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tetang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan serta melaksanakan hasil evaluasi dan pencapaian pada semester sebelumnya. Maksud lainnya adalah untuk mengevaluasi hasil pencapaian di semester sebelumnya agar sasaran bisa lebih fokus , output hasil kegiatan agar lebih maksimal sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan DP3AP2KB Tahun 2024 adalah agar memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan DP3AP2KB Tahun Anggaran 2024.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja DP3AP2KB Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEMESTER I TAHUN 2024

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi reasoning dan telaahan terhadap capaian target awal tahun serta pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD PADA SEMESTER I 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Pada Semester I 2024 dan capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Perubahan DP3AP2KB Kota Cimahi tahun 2024

Evaluasi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2024 mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis DP3AP2KB.

Pada tahun 2024 anggaran yang dikelola oleh DP2KBP3A Kota Cimahi berjumlah sebesar Rp. 19.801.863.070-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 12 Program dan 24 Kegiatan 57 Sub Kegiatan.

Realisasi yang dicapai pada semester I 2024 secara keseluruhan dari belanja sebesar Rp. 19.801.863.070,- terealisasi sebesar Rp. 6.415.359.266,- atau sebesar 31,79% merupakan hasil yang telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program yang sudah direncanakan.

Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran dan langkah langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi pada tahun 2024 agar sasaran dan target serta output kegiatan lebih tepat, dan berhasil dengan maksimal.

Belanja langsung dibagi kedalam tiga urusan yang diampu oleh DP3AP2KB Kota Cimahi yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alokasi anggaran sebesar semula Rp.1.549.576.676,- menjadi Rp. 1.528.644.776,- dengan 6 Program, 7 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. Sasaran dari urusan ini terutama adalah prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas Keluarga, persentase Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender, Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar, persentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu, serta persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu, dalam urusan ini termasuk urusan Kesekretariatan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan DP3AP2KB melalui ketertiban administrasi, kapasitas aparatur yang handal bagi pelayanan masyarakat serta kualitas perencanaan bagi pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan alokasi anggran semula sebesar Rp. 7.497.383.850,- menjadi Rp. 7.476.854.300,- terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan, 22 Sub Kegiatan. Sasaran dari pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 3.092.236.880,- menjadi Rp.3.259.320.564,-. Terdiri dari 2 Program dan kegiatan 2 dan 9 Sub Kegiatan.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2024 Semester I dapat dilihat berikut ini :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH

1. Kegiatan Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 44.686.000- dan terealisasi sebesar Rp.15.582.000- atau sebesar 34,87% Penyerapan dana untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan. .

2. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 61.665.650- terealisasi sebesar Rp. 26.814.270,- atau sebesar 43,48 %. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp 6.283.840.864,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.224.342.030,- atau 51,31 % Penyerapan sesuai kebutuhan.

4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Anggaran Kegiatan sebesar Rp 46.410.210,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.555.320,- atau sebesar 46,45 % .penyerapan sesuai kebutuhan.

5. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 56.325.760,- dan Terealisasi sebesar 16.436.000,- atau sebesar 29,18% penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 11.653.000,- realisasi sebesar Rp. 3.558.500,- atau 30,54%. Penyerapan sesuai kebutuhan.

7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.160.500,- atau sebesar 50,59 % dan disesuaikan kebutuhan .

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.357.000,- Realisasi Belanja sebesar Rp. 27.114.200,- atau 38,54 %. Terdiri dari belanja natura dan pakan natura, Belanja mamin Rapat dll .

9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 58.080.200,- terealisasi sebesar Rp. 24.249.400,- atau sebesar 41,75 % penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan.

10. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.512.000 atau sebesar 16,80% Penyerapan sesuai kunjungan tamu yang difasilitasi.

11. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 174.930.000- terealisasi sebesar Rp. 59.277.062,- atau sebesar 33,89 %. penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan.

12. Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 108.100.000- pada semester I tahun anggaran 2024 anggaran ini belum terealisasi karena sewa tempat bangunan kantor akan dilaksanakan pada semester II.

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000-terrealisasi sebesar Rp. 2.353.974,- atau sebesar 4,71 %. penyerapan disesuaikan dengan tagihan.

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.780.000-terrealisasi sebesar Rp. 23.160.500- atau sebesar 50,59 %. penyerapan disesuaikan dengan tagihan.

15. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.035.120,-- terrealisasi sebesar Rp. 45.107.450,- atau sebesar 15,03%. penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam sub kegiatan ini terdapat beberapa belanja diantaranya anggaran digunakan untuk belanja Jasa Tenaga Kebersihan(THL Kebersihan) , alat kebersihan dan bahan kebersihan serta belanja iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan serta jaminan Kematian bagi Non ASN.

16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 45.043.250,- atau sebesar 81,90 %. penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan.

17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.009.000,- terrealisasi sebesar Rp. 7.955.000,- atau sebesar 99,33 %. penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan.

18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 278.792.860,- terrealisasi sebesar Rp. 94.310.650,- atau sebesar 33,83%. penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi. Dalam sub kegiatan ini terdapat beberapa

belanja diantaranya anggaran digunakan untuk belanja Jasa Tenaga pegemudi (THL),belanja bahan bakar, pelumas, pajak dan perijinan belanja asuransi, serta belanja iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan serta jaminan Kematian bagi Non ASN.

II. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

19. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 214.594.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.469.000,- atau 29,58 %, realisasi sesuai kebutuhan.

20. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 159.959.700,- realisasi sebesar Rp. 37.138.200,- atau sebesar 23,22 % realisasi sesuai kebutuhan.

III. PROGRAM PERLIDUNGAN PEREMPUAN

21. Kegiatan Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 363.581.026,- yang terealisasi Rp. 95.067.835,- atau 26,15 %, realisasi sesuai kebutuhan, termasuk pembayaran jasa Tenaga Harian lepas P2TP2A.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

22. Kegiatan Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota

Anggaran kegiatan sebesar Rp.73.319.500,- yang terealisasi Rp.1.680.000,- atau 2,29%, realisasi sesuai kebutuhan.

II. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

23. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran kegiatan sebesar Rp.124.460.000,- yang terealisasi Rp.44.991.000,- atau 36,15 %, realisasi sesuai kebutuhan.

24. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

Anggaran kegiatan sebesar Rp.105.563.250,- yang terealisasi Rp.10.325.000,- atau 9,78 %, realisasi sesuai kebutuhan.

25. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran kegiatan sebesar Rp.105.563.250,- yang terealisasi Rp.10.325.000,- atau 9,78%, realisasi sesuai kebutuhan.

III. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

26. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 384.479.700,- yang terealisasi Rp.63.512.000,- atau 16,52%, realisasi sesuai kebutuhan.

IV. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Anggaran kegiatan sebesar Rp. 123.618.750,- yang terealisasi Rp.32.028.000,- atau 25,91%, realisasi sesuai kebutuhan.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

27. Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Formal dan Informal

Anggaran kegiatan sebesar Rp.79.211.550,- yang terealisasi Rp.17.962.550,- atau 22,68 %, realisasi sesuai anggaran kas semester I.

28. Kegiatan Penyediaan dan Data Informasi Keluarga

Anggaran kegiatan sebesar Rp.612.280.700,- yang terealisasi Rp.94.736.500,- atau 91,57 %, realisasi anggaran sesuai kebutuhan.

29. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.23.728.750,- sub kegiatan ini belum terealisasi di semester I.

30. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.988.500, atau sebesar 11,65%. Penyerapan sesuai dengan kebutuhan di semester I

VI. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

31. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai kearifan budaya lokal.

Anggaran kegiatan sebesar Rp.54.000.000,- yang terealisasi Rp.31.500.000,- atau 58,33%, realisasi sesuai kebutuhan.

32. Kegiatan Promosi dan KIE program Bangsa

**Kencana melalui Media Massa, Cetak dan Elektroik
serta media Luar Ruang**

Anggaran kegiatan sebesar Rp.150.000.000,- yang terealisasi Rp.10.000.000,- atau 6,67%, realisasi sesuai kebutuhan.

**33. Kegiatan Penggerakan Kader Institusi masyarakat
Pedesaan**

Anggaran kegiatan sebesar Rp.879.322.000,- yang terealisasi Rp.342.380.000,- atau 38,94%, Anggaran ini merupakan pemberian honor bagi kader Pos KB sebanyak 70 orang dan Sub Pos KB sebanyak 320 orang.

34. Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Anggaran kegiatan sebesar Rp.80.000.000,- terealisasi Rp.15.700.000,- atau 19,63%, realisasi sesuai kebutuhan anggaran ini berasal dari DAK BKKP Pusat.

**35. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja
Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 117.870.000,- atau sebesar 47,15%.

**36. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai
Penyuluhan Bangga Kencana**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 58.000.000,- kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 atau sebesar 26,72%.

**37. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
dan Mitra Kerja Lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Keertaan Ber KB**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 55.987.400,- pada semester I kegiatan ini masih belum terealisasi.

**38. Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB
Bergerak**

Anggaran kegiatan sebesar Rp.199.642.000,- yang terealisasi Rp.10.022.000,- atau 5,02 %, realisasi sesuai kebutuhan.

39. Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 11.200.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.800.000,- atau sebesar 25% realisasi sesuai kebutuhan.

40. Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 457.925.000,- Realisasi sebesar Rp. 122.625.000,- atau 26,78 % Penyerapan sesuai kebutuhan.

41. Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 45.000.000,- realisasi sebesar Rp. 14.500.000,- atau 32,2 % Realisasi sesuai kebutuhan pada Semester I.

42. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 784.075.900,- terealisasi pada semester I sebesar Rp. 258.989.445,- atau sebesar 33,03%

43. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Anggaran untuk kegiatan ini tersedia sebesar Rp. 51.600.000,- terealisasi pada semester I sebesar Rp. 7.500.000,- atau sebesar 14,53%.

VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

44. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau UPPKA)

Anggaran kegiatan sebesar Rp.335.005.450,- terealisasi Rp.154.464.000,- atau 46,11% realisasi sesuai kebutuhan.

45. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan, serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Anggaran kegiatan sebesar Rp.83.580.250,- kegiatan ini akan dilaksanakan pada semester II.

46. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja

Anggaran kegiatan sebesar Rp.141.174.850,- yang terealisasi Rp.12.585.850,- atau 8,92%, realisasi sesuai kebutuhan.

47. Kegiatan Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga atau UPPKA)

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 363.453.000,- Realiasi sebesar Rp. 336.045.000, atau sebesar 92,46 %.

48. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga atau UPPKS)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.737.340.000,- realisasi sebesar Rp. 921.035.657.- atau sebesar 33,65 % Anggaran ini tidak dapat terserap secara maksimal karena kodefikasi kegiatan baru masuk pada bulan Mei 2022 dan baru dapat diserap sekitar bulan Juni 2022.

- 49. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK -R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 180.000.000,- dan sampai semester I masih proses di PBJ dan realisasi keuangannya pada semester II.

- 50. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**

Anggaran untuk kegiatan ini tersedia sebesar Rp. 2.759.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 721.620.000,- atau sebesar 26,15%

VIII. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

- 51. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 16.880.000,- realisasi sebesar Rp. 5.850.000,- atau sebesar 34,66%

- 52. Kegiatan Fasilitasi , Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 182.720.000,- realisasi sebesar Rp. 148.190.500,- atau sebesar 81,10%

IX. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- 53. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat.**

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 231.690.260,- Realisasi sebesar Rp. 102.582.280,- atau sebesar 44,28%.

54. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 51.814.900,- Realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

55. Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 603.447.800,- Realisasi sebesar Rp. 49.736.000,- atau sebesar 8,24%.

56. Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu , LPM dan karang Taruna) Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 762.011.604,- Realisasi sebesar Rp. 43.856.000,- atau sebesar Rp. 28,77%

57. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang Taruna) Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.435.640.000,- realisasi sebesar Rp. 75.834.000,- atau sebesar 5,28%. Penyerapan sesuai kebutuhan.

58. Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Anggran Kegiatan ini sebesar Rp. 188.960.000,- realisasi sebesar Rp. 44.984.000,- atau sebesar 23,81%. Penyerapan sesuai kebutuhan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan tersebut di atas, dalam penilaian kinerja DP3AP2KB terdapat beberapa tolak ukur yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

A. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :
 - a. Unmet need 13% dengan capaian 12,7% atau 102%
 - b. Rasio Akseptor KB MKJP target 34,92% dengan capaian sekitar 107%%
 - c. Rata-rata jumlah anak per keluarga capaiannya :2,3 :100%
 - d. Cakupan PUS<20 tahun capaiannya 117%%
 - e. Cakupan Kebersertaan keluarga dalam BKB capaiannya 78%%
 - f. Cakupan Kebersertaan keluarga dalam BKR capaiannya 152%%
 - g. Cakupan Kebersertaan keluarga dalam BKL capaiannya 160%
 - h. Cakupan Kebersertaan keluarga dalam UPPKA capaiannya 26%
 - i. Cakupan Kebersertaan keluarga dalam PIK R/M capaiannya 91%
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
 - a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah capaiannya sebesar 84%
 - b. Jumlah Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga capaiannya 100%
 - c. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu capaiannya 100 %
 - d. Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender capaian 114 %
 - e. Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar sebesar 106 %
3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
 - a. Persentase kelurahan yang terbina capaiannya 100%

- b. Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif capaiannya 100%.

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan di tingkat Nasional dan Propinsi, sebagai berikut :

A. Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Hak Anak

Perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai posisi yang lemah, baik secara historis, budaya, maupun kondisi fisik, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mampu membuat keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Pemikiran dasar tersebut membedakan konsep pemberdayaan perempuan dari konsep pemberdayaan masyarakat, bukan *empowerment* yang berkaitan dengan kekuasaan, namun cenderung sebagai sebuah upaya meningkatnya akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya (ekonomi, politik, sosial, budaya, dll) dan meningkatnya kemampuan perempuan di berbagai bidang (pendidikan, keterampilan, dll). Sedangkan 'empowerment' dari kata 'empower' artinya member kuasa, atau makna yang dipahami dalam kerangka penelitian WEMC (2006) adalah peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan mandiri yang mengubah hubungan kekuasaan-kekuasaan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan diberikan secara khusus kepada perempuan dan anak-anak karena perannya yang sangat besar bagi masa depan bangsa sebagai pendidik utama bagi generasi penerus bangsa dan generasi bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Kesetaraan gender menurut UNESCO adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, baik secara biologis maupun konstruksi sosial budaya.

Kesetaraan gender dilakukan dengan terus mendorong optimalisasi peran perempuan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, bakat, minat, serta keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya baik secara psikis maupun fisik.

Pemberdayaan perempuan meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan perempuan sebagai ibu dalam keluarga yang penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mendorong peran aktif perempuan untuk mendayagunakan potensinya untuk mengintervensi anggota masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, tidak menikah pada usia dini karena kesiapan mental dan ekonomi yang belum matang, serta melakukan inisiasi kepada masyarakat untuk membangun karakter bangsa yang positif. Sasaran pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki

karena budaya patriarki yang mengakar kuat mempengaruhi keadilan gender.

Hal penting yang harus menjadi pokok pemberdayaan perempuan adalah:

1. Pentingnya peran ayah dan ibu di dalam tumbuh kembang anak dan menjaga serta melindungi anak dari tindak pelecehan dan kekerasan.
2. Pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik bukan hanya untuk memenuhi kuota 20% keterwakilan perempuan namun merupakan peluang strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Pentingnya meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi mikro, kecil, dan menengah.
4. Pentingnya perempuan dan anak perempuan mendapatkan akses di berbagai aspek kehidupan.
5. Pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.

B. Perencanaan Keluarga

Pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan makmur membutuhkan sumberdaya yang baik dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Keterbatasan sumberdaya mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pertumbuhan kuantitas penduduk sehingga tercapai kualitas manusia yang diharapkan. Setiap orang mempunyai peran yang penting dalam perencanaan pertumbuhan kuantitas dan kualitas penduduk.

Hal strategis yang penting diperhatikan adalah:

1. Keterkaitan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan, faktor dinamika kependudukan merupakan

salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

2. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional. Pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, dan Pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional.
3. Desentralisasi, Pembangunan Kependudukan memiliki keterikatan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah.
4. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
5. Sanksi yang dikaitkan insentif dan disinsentif baik kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
6. Keberhasilan pembangunan kependudukan sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat Partisipasi & kepedulian seluruh komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi yang dikaitkan dengan insentif & disinsentif.
7. Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga sangat berkait erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan.
8. Pengelolaan kelahiran, penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi . Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil .

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Kemandirian masyarakat yang berproses dan telah dilaksanakan mencerminkan paradigma pembangunan yang *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui :

1. Penciptaan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat.
3. *Protecting*, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi . Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moril dan materil .

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan

terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Isu Strategis dirumuskan dari beberapa kondisi penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada programprogram perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah semula Rp. 44.686.000,- menjadi 40.006.000-
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula Rp. 61.665.650,- menjadi Rp. 61.215.650,-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 6.283.840.864,- menjadi Rp. 6.476.248.450,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD s Rp. 46.410.210,- menjadi 48.805.500,-

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan anggaran semula Rp. 56.325.760,-menjadi Rp. 16.703.960,-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami perubahan anggaran semula Rp. 11.653.000,- menjadi Rp. 10.035.000,-
- d. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor semula Rp. 55.000.000,- menjadi 55.232.000,-
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak mengalami perubahan anggaran Rp. 8.009.000,-

- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor semula Rp. 70.357.000,- menjadi Rp. 83.374.000,-
- g. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp. 58.080.200,- menjadi Rp.54.650.200,-
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu mengalami perubahan anggaran semula Rp.9.000.000,- menjadi Rp.7.500.000,-
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD semula Rp. 174.930.000,- menjadi Rp. 280.089.000,-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp.108.100.000,- menjadi Rp.98.100.000,-

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Semula Rp.50.000.000,- menjadi Rp. 13.900.000,-
- b. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor semula Rp. 45.780.000,- menjadi Rp. 49.440.000,-
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor semula Rp.300.035.120,- menjadi Rp. 267.978.120,-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan semula Rp.278.792.860,- menjadi 280.531.234.

2. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan kebijakan PUG anggaran sebesar Rp. 159.959.700 dan tidak mengalami perubahan.

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi semula Rp. 214.594.750,- menjadi 211.430.750,-

Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan tetap Rp. 19.474.000,-

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp. 363.581.026,- menjadi Rp. 348.380.026,-

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp. 348.479.700, - menjadi Rp. 381.912.800

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

- a. Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 73.319.500, dan tidak mengalami perubahan.

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp. 124.460.000, dan tidak mengalami perubahan.
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota semula Rp. 105.563.250,- menjadi Rp. 107.963.250,-

7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal semula Rp. 79.211.550, dan tidak mengalami perubahan.
- b. Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan semula Rp. 23.728.750, dan tidak mengalami perubahan.

- c. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana tidak mengalami perubahan tetap Rp. 60.000.000,-

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga semula Rp. 612.280.700,- menjadi Rp. 346.153.850,-
- b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB DP3AP2KB dengan anggaran Rp. 73.439.000,-

8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Rp. 150.000.000,-
- b. Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja kepada Stakeholder dan Mitra Kerja DP3AP2KB sebesar Rp. 250.000.000,-
- c. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal (DP3AP2KB) sebesar Rp. 95.640.000,-
- d. Pelaksanaan mekanisme operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (RAKORCAM), Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES), dan Mini Lokakarya (Minilok) DP3AP2KB sebesar Rp. Rp.54.000.000,-
- e. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Sebesar di DP3AP2KB Rp. 58.000.000,-
- f. Pengendalian Program KKBPK di DP3AP2KB Sebesar Rp. 80.000.000,-

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kegiatan ini akan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 879.322.000, dan tidak mengalami perubahan.
- b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluh, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan anggaran sebesar Rp. 784.075.900, dan tidak mengalami perubahan.

Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Rp. 199.642.000,-
- b. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya dengan anggaran sebesar Rp. 11.200.000,-
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran sebesar RP. 457.925.000,-
- d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebesar Rp. 51.600.000,-

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- a. Penguatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebesar RP. 55.987.400,-
- b. Pembinaan Terpadu Kampung KB sebesar RP. 146.250.000

3.9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) dengan anggaran semula sebesar Rp. 335.005.450,- menjadi Rp. 580.602.750,-
- b. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan anggaran sebesar Rp. 83.580.250,- dan tidak mengalami perubahan.
- c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,-
- d. Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan anggaran sebesar Rp. 2.759.400.000,-

Kegiatan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja dengan anggaran semula sebesar Rp. 141.174.850,- dan tidak mengalami perubahan.

3.10. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 16.880.000,- tidak mengalami perubahan.
- b. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar semula Rp. 182.720.000,- tidak mengalami perubahan.

3.11. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

- a. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula Rp. 117.085.000,- menjadi Rp. 200.382.400,-
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 231.690.260,- dan tidak mengalami perubahan.

- c. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat semula Rp. 1.435.640.000-menjadi Rp. 1.261.148.000,-
- d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa Rp. 51.814.900 ,- tidak mengalami perubahan,-
- e. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna semula Rp. 188.960.000,- menjadi 153.808.000,-
- f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat hanya pencahangan saja
- g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga semula Rp. 603.447.800,-menjadi Rp. 599.247.800,-

Matrik Renja Perubahan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18.793.884.800,00	19.801.863.070,00	20.074.417.754,00	1.280.532.954,00							22.733.082.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.793.884.800,00	19.801.863.070,00	20.074.417.754,00	1.280.532.954,00							22.733.082.000,00	
	2 /	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				9.348.180.750,00	9.212.242.340,00	9.338.242.890,00	9.937.860,00							11.906.000.000,00	
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	-	75 BB B Nilai Nilai	7.738.087.050,00	7.662.665.664,00	7.809.598.114,00	1.942.912.950,00							9.681.000.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	1 Tahun	226.971.750,00	106.351.650,00	101.221.650,00	-125.750.100,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Kinerja Perangkat Daerah		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	64.705.000,00	44.686.000,00	40.006.000,00	-24.699.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	162.266.750,00	61.665.650,00	61.215.650,00	-101.051.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah fasilitas administrasi keuangan daerah	-	1 Tahun	6.481.582.790,00	6.330.251.074,00	6.525.053.950,00	43.471.160,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Keuangan Perangkat Daerah		7.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ bulan	462 Orang/ bulan	6.433.830.790,00	6.283.840.664,00	6.476.248.450,00	42.417.660,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			7.850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	47.752.000,00	46.410.210,00	48.805.500,00	1.053.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	1 Tahun	57.520.000,00	56.325.760,00	16.703.980,00	-40.816.040,00				Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Pegawai Perangkat Daerah		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	32 Orang	57.520.000,00	56.325.760,00	16.703.980,00	-40.816.040,00		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas administrasi umum perangkat daerah	-	1 Tahun	398.622.250,00	387.029.200,00	498.889.200,00	100.266.950,00				Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah		621.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.654.000,00	11.653.000,00	10.035.000,00	-1.619.000,00		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	55.232.000,00	232.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	-			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.010.000,00	8.009.000,00	8.009.000,00	-1.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	79.958.400,00	70.357.000,00	83.374.000,00	3.415.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.999.850,00	58.080.200,00	54.650.200,00	-5.349.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															

			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	174.930.000,00	280.089.000,00	105.089.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah fasilitas pengadaan barang milik daerah	-	1 Tahun	108.100.000,00	108.100.000,00	54.050.000,00	-54.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Barang Milik Daerah		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	108.100.000,00	108.100.000,00	54.050.000,00	-54.050.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	1 Tahun	186.113.000,00	395.815.120,00	333.148.120,00	147.035.120,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Perangkat Daerah		390.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Lapora n	50.000.000,00	50.000.000,00	13.900.000,00	-36.100.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Lapora n	45.780.000,00	45.780.000,00	51.270.000,00	5.490.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Lapora n	90.333.000,00	300.035.120,00	267.978.120,00	177.645.120,00	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	279.177.280,00	278.792.860,00	280.531.234,00	1.353.974,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	279.177.280,00	278.792.860,00	280.531.234,00	1.353.974,00	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	55 Persen	417.250.000,00	374.554.450,00	371.390.450,00	102.750.000,00							520.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota	-	1 Tahun	175.000.000,00	159.959.700,00	159.959.700,00	-15.040.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lembaga Pemerintah		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	159.959.700,00	159.959.700,00	-15.040.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota	-	1 Tahun	242.250.000,00	214.594.750,00	211.430.750,00	-30.819.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Perempuan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi															
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	242.250.000,00	214.594.750,00	211.430.750,00	-30.819.250,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3	2.06.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	-	100 persen	359.100.000,00	363.581.026,00	348.380.026,00	390.900.000,00							750.000.000,00	
	2.06.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kota	-	1 Tahun	359.100.000,00	363.581.026,00	348.380.026,00	-10.719.974,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Perempuan korban kekerasan		750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.06.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	25 Orang	25 Orang	359.100.000,00	363.581.026,00	348.380.026,00	-10.719.974,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	-	100 Persen	405.650.000,00	384.479.700,00	381.912.800,00	44.350.000,00							450.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota	-	1 Tahun	405.650.000,00	384.479.700,00	381.912.800,00	-23.737.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	keluarga		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	405.650.000,00	384.479.700,00	381.912.800,00	-23.737.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

5	2.06.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	-	75 Persen	74.999.750,00	73.319.500,00	73.319.500,00	15.000.250,00							90.000.000,00	
	2.06.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	-	1 Tahun	74.999.750,00	73.319.500,00	73.319.500,00	-1.680.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.06.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	74.999.750,00	73.319.500,00	73.319.500,00	-1.680.250,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	2.06.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	-	91 Persen	225.787.700,00	230.023.250,00	232.423.250,00	14.212.300,00							240.000.000,00	
	2.06.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	-	1 Tahun	225.787.700,00	230.023.250,00	232.423.250,00	6.635.550,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha		240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.06.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	10 Organisasi	131.100.000,00	124.460.000,00	124.460.000,00	-6.640.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	94.687.700,00	105.563.250,00	107.963.250,00	13.275.550,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	prosentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	-	100 persen	127.306.250,00	123.618.750,00	121.218.750,00	47.693.750,00							175.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota	-	1 Tahun	127.306.250,00	123.618.750,00	121.218.750,00	-6.087.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	Anak		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA															
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1 Orang	1 Orang	127.306.250,00	123.618.750,00	121.218.750,00	-6.087.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.947.780.000,00	3.092.236.880,00	3.259.320.564,00	1.311.540.564,00							2.960.000.000,00	
1	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang terbina	-	100 Persen	207.680.000,00	199.600.000,00	199.600.000,00	92.320.000,00							300.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	-	1 Tahun	207.680.000,00	199.600.000,00	199.600.000,00	-8.080.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	Pemerintahan Desa/Kelurahan		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.13.04.2.01.001 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa															
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	15 Dokumen	15 Dokumen	17.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00	-800.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000,00	182.720.000,00	182.720.000,00	-7.280.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif	-	100 persen	1.740.100.000,00	2.892.636.880,00	3.059.720.564,00	939.900.000,00							2.880.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan	-	1 Tahun	1.740.100.000,00	2.892.636.880,00	3.059.720.564,00	1.319.620.564,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Lembaga Kemasyarakatan		2.880.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	530.100.000,00	381.083.920,00	762.011.604,00	231.911.604,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Lembaga	15 Lembaga	250.000.000,00	231.690.280,00	231.690.280,00	-18.309.740,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Unit	15 Unit	285.000.000,00	1.435.640.000,00	1.281.148.000,00	976.148.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	51.814.900,00	51.814.900,00	-3.185.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	188.960.000,00	153.808.000,00	-36.192.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	603.447.800,00	599.247.800,00	199.247.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			440.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.497.924.050,00	7.497.383.850,00	7.476.854.300,00	-21.069.750,00							7.947.082.000,00	

1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	-	36 persen	673.488.650,00	775.221.000,00	509.094.150,00	80.511.350,00							754.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah fasilitas pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah	-	1 Tahun	176.903.650,00	162.940.300,00	162.940.300,00	-13.963.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kebijakan Pemerintah Daerah		198.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal															
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	82.214.700,00	79.211.550,00	79.211.550,00	-3.003.150,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan															
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	20 Organisasi	20 Organisasi	30.488.950,00	23.728.750,00	23.728.750,00	-6.760.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana															

			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64.200.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kota	-	1 Tahun	496.585.000,00	612.280.700,00	346.153.850,00	-150.431.150,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Penduduk		558.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga															
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	490.585.000,00	612.280.700,00	346.153.850,00	-144.431.150,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB															
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-		3.242.888.950,00	3.223.002.300,00	3.223.002.300,00	205.193.050,00							3.448.082.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	-	1 Tahun	493.750.000,00	637.000.000,00	637.000.000,00	143.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat		493.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK															
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana															
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	57.750.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	250.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		57.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	6.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		39.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																
		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	7.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-			47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	10 Organisasi	120.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	130.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah fasilitasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB	-	1 Tahun	1.403.341.950,00	1.663.397.900,00	1.663.397.900,00	280.055.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	Tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB		1.575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	390 Orang	390 Orang	887.042.950,00	879.322.000,00	879.322.000,00	-7.720.950,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	516.299.000,00	784.075.900,00	784.075.900,00	267.776.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		575.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kota	-	1 Tahun	1.094.349.000,00	720.367.000,00	720.367.000,00	-373.982.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	Akseptor KB	1.114.332.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	26.100.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-14.900.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		26.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	750 Orang	750 Orang	693.595.000,00	457.925.000,00	457.925.000,00	-235.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		693.595.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB															
		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	1 Unit	120.937.000,00	0,00	0,00	-120.937.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK- BIDANG KESEHATAN DAN KB- PENUGASAN- PENGUATAN INTERVENSI STUNTIN G	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			120.937.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	53.700.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	-2.100.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			53.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak															
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	200.017.000,00	199.642.000,00	199.642.000,00	-375.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga peran serta organisasi kemasyarakatan	-	1 Tahun	251.448.000,00	202.237.400,00	202.237.400,00	-49.210.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Organisasi kemasyarakatan		265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Organisasi	1 Organisasi	56.448.000,00	55.987.400,00	55.987.400,00	-460.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	3 Laporan	195.000.000,00	146.250.000,00	146.250.000,00	-48.750.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun persentase kepesertaan keluarga dalam BKB Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	-	0,2 0,35 33 40 45 8 persen persen persen persen	3.581.546.450,00	3.499.160.550,00	3.744.757.850,00	63.453.550,00							3.645.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitas pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	1 Tahun	3.365.490.500,00	3.357.985.700,00	3.603.583.000,00	238.092.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	Keluarga	3.470.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)															
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	89.790.800,00	83.580.250,00	83.580.250,00	-6.210.550,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	6 Laporan	156.299.700,00	335.005.450,00	580.602.750,00	424.303.050,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	360.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-180.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))															

			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1314 Orang	1314 Orang	2.759.400.000,00	2.759.400.000,00	2.759.400.000,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	-	1 Tahun	216.055.950,00	141.174.850,00	141.174.850,00	-74.881.100,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Organisasi kemasyarakatan		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	216.055.950,00	141.174.850,00	141.174.850,00	-74.881.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-				175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
J U M L A H					18.793.884.800,00	19.801.863.070,00	20.074.417.754,00	1.280.532.954,00								22.733.082.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi serta hasil evaluasi fisik dan keuangan samapai dengan triwulan II Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan renja DP3AP2KB Kota Cimahi sampai dengan Semester I (Bulan Juni Tahun 2024)

Perubahan Renja DP3AP2KB Kota Cimahi tahun 2024 terdiri dari 12 Program, 24 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan, secara keseluruhan terdapat penambahan anggaran dari Bantuan Gubernur sebesar Rp. 380.927.684 pada kegiatan Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/keluhan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Adapun jumlah anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak< Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana berjumlah sebesar Rp. 20.074.417.754.

Adapun realisasi sampai dengan Bulan Juni (Semester I) adalah sebesar Rp. 6.415.359.266,- atau sebesar 31,79%%

Pelaksanaan rencana kerja Perubahan tergantung sepenuhnya kebijakan yang telah dilaksanakan pada anggaran murni. Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2024 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Pj.Wali Kota melalui kepala Bappelitbangda setiap Triwulan.
3. Pada akhir tahun anggaran 2024, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tersebut merupakan acuan bagi penyusunan rencana kerja periode tahun berikutnya.
4. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,**


dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Utama Muda, IV/a
NIP. 19680101 199803 2009